

## Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Penguatan Demokrasi Mahasiswa di FKIP Universitas Riau

Ella Saradilla<sup>1</sup>, Muhammad Ihksan Darmawan<sup>2</sup>, Nora Saurli Nainggolan<sup>3</sup>, Indah Lamtiur Simatupang<sup>4</sup>, M Rasyid Ridho<sup>5</sup>, Wan Fazila Azila<sup>6</sup>, Hamdi Abdullah Hasibuan<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Indonesia

<sup>1</sup>[ella.saradilla1561@student.unri.ac.id](mailto:ella.saradilla1561@student.unri.ac.id), <sup>2</sup>[Muhammad.Ihksan2602@student.unri.ac.id](mailto:Muhammad.Ihksan2602@student.unri.ac.id), <sup>3</sup>[nora.saurli1557@student.unri.ac.id](mailto:nora.saurli1557@student.unri.ac.id), <sup>4</sup>[indah.lamtiur2616@student.unri.ac.id](mailto:indah.lamtiur2616@student.unri.ac.id), <sup>5</sup>[m.rasyid1555@student.unri.ac.id](mailto:m.rasyid1555@student.unri.ac.id), <sup>6</sup>[wan.fazila1550@student.unri.ac.id](mailto:wan.fazila1550@student.unri.ac.id), <sup>7</sup>[hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id](mailto:hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id)

### ABSTRACT

*Participatory democracy is one of the important indicators in realizing a democratic, fair, and inclusive campus life. Student organizations have a strategic role in fostering political awareness and forming active and critical student characters. This study aims to analyze the role of student organizations at the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) of Riau University in strengthening participatory democracy among students. The method is descriptive qualitative research with data collection in the form of observations, interviews, and documentation studies of organizational administrators and active students. The results of the study show that organizations such as BEM, DPM, and HIMA have contributed to political education, advocacy, and the formation of social participation values through various work programs. However, student participation is still low due to various factors such as apathy, lack of program innovation, and changes in the social preferences of the younger generation. In conclusion, the role of FKIP student organizations is quite significant, but needs to be optimized through a more creative and adaptive approach so that participatory democracy in the campus environment can develop more substantially.*

**Keywords:** Student Organizations, Participatory, Democracy

### ABSTRAK

Demokrasi partisipatif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis, adil, dan inklusif. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran politik serta membentuk karakter mahasiswa yang aktif dan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau dalam penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa. Metode dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap pengurus organisasi dan mahasiswa aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi seperti BEM, DPM, dan HIMA memiliki kontribusi dalam pendidikan politik, advokasi, serta pembentukan nilai partisipasi sosial melalui berbagai program kerja. Namun, partisipasi mahasiswa masih rendah akibat berbagai faktor seperti apatisme, kurangnya inovasi program, dan perubahan preferensi sosial generasi muda. Kesimpulannya, peran organisasi mahasiswa FKIP cukup signifikan, tetapi perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif agar demokrasi partisipatif di lingkungan kampus dapat berkembang secara lebih substansial.

**Kata Kunci:** Organisasi Kemasiswaan, Partisipatif, Demokrasi

#### Corresponding Author:

Ella Saradilla,  
Universitas Riau  
Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Indonesia  
Email: [ella.saradilla1561@student.unri.ac.id](mailto:ella.saradilla1561@student.unri.ac.id)



## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan modern telah mengalami berbagai perkembangan dan adaptasi seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan zaman. Salah satu bentuk demokrasi yang kini menjadi perhatian dalam diskursus akademik dan praksis kehidupan bernegara adalah demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif bukan hanya menekankan pada hak memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga pada keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Dalam konteks perguruan tinggi, demokrasi partisipatif menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk generasi intelektual yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran politik dan sosial yang tinggi. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan kelompok intelektual muda memiliki potensi besar dalam menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai demokratis melalui partisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Perguruan tinggi menjadi wadah strategis dalam mendidik dan melatih mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Universitas Riau, khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA) memiliki peran yang sangat vital dalam membangun kesadaran politik mahasiswa. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa, tetapi juga sebagai medium pendidikan politik informal yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif. Melalui kegiatan-kegiatan seperti forum diskusi, seminar kebangsaan, pelatihan advokasi, dan musyawarah besar, mahasiswa diajak untuk memahami struktur kekuasaan, sistem pengambilan keputusan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dalam proses tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpendapat, berdiskusi secara sehat, dan menghargai perbedaan pandangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penguatan demokrasi partisipatif dikalangan mahasiswa tidak berjalan dengan mulus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus organisasi kemahasiswaan FKIP Universitas Riau, ditemukan adanya penurunan minat mahasiswa terhadap kegiatan organisasi, partisipasi yang rendah dalam pemilihan raya mahasiswa (pemira), serta kecenderungan apatisisme yang semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan nilai-nilai demokratis di lingkungan kampus. Dalam dua tahun terakhir, jumlah partisipan dalam pemira FKIP mengalami penurunan, dari 1.889 mahasiswa pada tahun 2023 menjadi 1.818 mahasiswa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan melemahnya daya tarik politik kampus dan rendahnya tingkat kepedulian mahasiswa terhadap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa sangat beragam. Pertama, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya keterlibatan dalam organisasi dan proses demokrasi kampus. Banyak mahasiswa yang menganggap bahwa kegiatan organisasi tidak memberikan manfaat langsung terhadap akademik atau masa depan mereka, sehingga lebih memilih untuk fokus pada studi atau aktivitas lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti berjualan online atau menjadi konten kreator di media sosial. Kedua, kurang inovatifnya program kerja organisasi kemahasiswaan yang cenderung bersifat seremonial dan berskala kecil, sehingga tidak mampu menarik minat mahasiswa secara luas. Ketiga, manajemen waktu yang buruk dan kesibukan perkuliahan juga menjadi alasan umum yang menyebabkan mahasiswa enggan untuk aktif dalam kegiatan organisasi. Keempat, budaya individualistik yang kian menguat dikalangan generasi muda turut mempengaruhi rendahnya semangat kolektif dan kerja sama dalam wadah organisasi.

Di sisi lain, organisasi kemahasiswaan tetap memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial di kampus. Dalam konteks demokrasi partisipatif, keberadaan BEM, DPM dan HIMA sangat strategis dalam membentuk kesadaran kritis dan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Organisasi ini menjadi tempat pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami realitas sosial, melatih kemampuan komunikasi, berpikir kritis, menyusun program kerja, hingga mengambil keputusan secara kolektif. Peran ini tidak dapat digantikan oleh pembelajaran di kelas, karena mencakup pengalaman langsung yang berkaitan dengan dinamika sosial dan kepemimpinan. Selain itu, organisasi mahasiswa juga berperan dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan kampus, menyuarakan aspirasi mahasiswa dan menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak birokrasi universitas. Dalam beberapa kasus, organisasi mahasiswa juga mampu menjadi kekuatan advokasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan mendorong terciptanya kebijakan kampus yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, upaya penguatan demokrasi partisipatif di lingkungan FKIP Universitas Riau harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Diperlukan inovasi dalam program kerja organisasi mahasiswa

agar lebih relevan dengan kebutuhan dan minat mahasiswa saat ini. Kegiatan-kegiatan seperti kelas edukasi, kajian isu-isu kontemporer, kampanye digital, dan pelatihan kepemimpinan harus terus dikembangkan untuk menarik partisipasi mahasiswa. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pihak fakultas dan universitas dalam bentuk fasilitasi, pendanaan, serta pengakuan terhadap pentingnya peran organisasi mahasiswa dalam pengembangan soft skills dan civic skills. Kolaborasi antara ORMAWA juga harus ditingkatkan agar tercipta sinergi dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana organisasi kemahasiswaan FKIP Universitas Riau berperan dalam membangun dan memperkuat demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa. Penulis akan menjabarkan segala data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Dan diharapkan karya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena melalui interpretasi mendalam terhadap tindakan dan gejala sosial yang terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian berada di Universitas Riau dengan subjek penelitian mahasiswa yang tergabung dalam Hima, BEM, dan DPM FKIP. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas subjek guna menangkap makna dari tindakan mereka. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan secara lebih fleksibel dan mendalam. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen seperti arsip organisasi, notulen rapat, serta produk kebijakan kemahasiswaan yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Demokrasi Partisipatif

Joseph Schumpeter pada tahun 1942 melakukan kritik terhadap demokrasi klasik yang sekedar mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah seperti kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Setelah meruntuhkannya secara efektif, Schumpeter mengemukakan apa yang menurutnya dinamakan “teori lain mengenai demokrasi” yang mana secara metodis, menurutnya demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang dalamnya individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Sholikin, 2021).

Demokrasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem pemerintahan, meskipun pelaksanaannya masih berbeda-beda disetiap negara. Ini mencerminkan keputusan mayoritas yang diberikan kebebasan oleh warga negara. Demokrasi dianggap sebagai kekuasaan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pendidikan demokratis adalah proses yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi diri manusia yang menghargai keragaman serta perbedaan sebagai hasil dari ragam budaya, etnis, dan agama. Nilai Paling utama yang ditekankan dalam Pendidikan demokratis adalah kesetaraan dan toleransi. Pendidikan demokrasi merupakan sebuah usaha yang terencana dilakukan negara dan masyarakat agar dapat mengenal, merasakan, menerapkan, mengembangkan konsep, serta nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran dalam masyarakat.

Pendidikan dalam sistem demokratis memiliki peran penting. Tujuan dari pendidikan ialah untuk mengajarkan warga negara mengenai nilai dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sekolah berfungsi sebagai tempat proses ini berlangsung secara resmi dan mencerminkan upaya guna mendidik warga negara menuju sebuah masyarakat sipil yang mendukung pelaksanaan demokrasi, dimulai dari lingkungan sekolah. Krisis demokrasi dalam era digital menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Meskipun teknologi informasi dan media sosial telah meningkatkan akses informasi dan interaksi antar individu secara global, dampak terhadap proses demokrasi juga menimbulkan tantangan serius. Krisis demokrasi di era digital menghadirkan tantangan kompleks dan unik dalam pengelolaan informasi. Era digital telah mengubah cara orang mengakses, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi secara drastis. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan akses lebih luas terhadap informasi, hal ini juga membawa risiko baru, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), propaganda politik, dan penggunaan data pribadi untuk manipulasi politik. Salah satu tantangan utama dalam mengelola informasi di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoax (Rohmatin et al., 2024).

Langkah-langkah untuk menciptakan suasana demokratis dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Fokusnya adalah memberikan pendidikan dan edukasi melalui distribusi brosur kepada warga.

Hasil pengamatan terhadap kondisi lingkungan menunjukkan bahwa masalah yang sering terjadi sebelum pemilu melibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan dan munculnya keinginan untuk golput. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban politik mereka (Wiralestari et al., 2024).

Aspek budaya juga berperan dalam kendala partisipasi masyarakat. Beberapa budaya mungkin memiliki tradisi partisipasi politik yang lemah atau norma yang menghambat wanita atau kelompok minoritas untuk terlibat dalam politik. Budaya juga dapat mempengaruhi pandangan terhadap isu-isu politik dan pemilihan calon-calon. Budaya partisipatif harus ditingkatkan dan dihormati untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Tantangan politik juga merupakan faktor yang signifikan dalam masalah partisipasi masyarakat (Fadillah et al., 2023).

Pengukuran partisipasi masyarakat juga dapat mencakup tingkat partisipasi dalam pemilihan lokal dan regional. Terlalu sering, fokus diberikan pada pemilu nasional, sementara pemilu lokal dan regional juga memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pemilihan lokal dan regional dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan yang lebih langsung memengaruhi komunitas mereka (Indriani, 2020).

Robert Dahl menekankan aspek partisipatif dalam demokrasi pada studinya yang mengajukan lima kualitas demokrasi sebagai idea politik, antara lain:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat
2. Partisipasi efektif berupa kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan yang kolektif;
3. Pembeneran kebenaran berupa adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. Kontrol terakhir terhadap agenda berupa adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputus melalui proses pemerintah termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili Masyarakat
5. Pencakupan berupa terlibatnya masyarakat yang mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum (Failaq & Madjid, 2022).

Demokrasi partisipatif adalah bentuk sistem politik di mana warga negara tidak hanya memilih perwakilan mereka dalam pemilu, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Ini melibatkan partisipasi langsung warga dalam berbagai aspek kebijakan dan proses politik, seperti berpartisipasi dalam diskusi, pemungutan suara, inisiatif rakyat, dan berbagai bentuk aksi politik lainnya.

Demokrasi partisipatif adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang menggabungkan unsur-unsur dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan: Warga negara memiliki kekuatan untuk memutuskan usulan kebijakan dan politisi mengambil peran dalam implementasi kebijakan. Para pemilih dapat memantau kinerja politisi hanya dengan membandingkan usulan warga negara dengan kebijakan yang benar-benar diterapkan. Akibatnya, kebijaksanaan politisi sangat dibatasi. Dalam sistem ini, sejauh mana warga negara dapat memengaruhi kebijakan dan menentukan prioritas sosial secara langsung selaras dengan sejauh mana mereka memilih untuk melibatkan diri dalam proses tersebut.

## **B. Teori Demokrasi Partisipatif**

Demokrasi partisipatif juga dipromosikan karena kemampuannya untuk memungkinkan kontrol rakyat yang lebih besar atas tindakan pejabat publik dan perwakilan daripada yang mungkin dapat dilakukan dengan pemahaman demokrasi yang lebih terbatas. Partisipasi memberikan lapisan pengawasan tambahan atas tindakan pejabat publik dengan meningkatkan potensi jalan bagi partisipasi, sehingga suara-suara yang berbeda pendapat dapat didengar, tokoh publik dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, dan setiap kegagalan kebijakan yang signifikan lebih mungkin terungkap. Demikian pula, setiap perilaku yang salah dapat terungkap dengan cara yang sama. Sorotan yang diberikan oleh keterlibatan langsung warga negara menyisakan sedikit tempat bagi politisi yang tidak bermoral.

Teori demokrasi partisipatif juga dibedakan berdasarkan nilai edukatifnya. Memang, dalam banyak hal, manfaat-manfaat ini dapat dianggap sebagai ciri khas demokrasi partisipatif. Posisi ini berbeda dari teori partisipatif epistemik yang hanya memahami partisipasi sebagai sarana transfer pengetahuan dari warga negara

kepada birokrat, atau sebagai sarana untuk menahan kekuasaan terpusat yang berlebihan atas keputusan publik. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa manfaat partisipasi dirasakan dalam kehidupan warga negara, serta dalam sistem politik. Dengan demikian, partisipasi memiliki pengaruh pada karakter, serta pengetahuan, dari mereka yang terlibat.

Berikut adalah beberapa teori utama yang mendasari konsep demokrasi partisipatif, yaitu:

a. Demokrasi Deliberatif

Teori ini menekankan pentingnya diskusi terbuka dan rasional antara warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah mencapai konsensus melalui pertukaran argumen yang saling menghormati dan berbasis pada alasan yang dapat diterima bersama. James Fishkin, seorang tokoh utama dalam teori ini, mengidentifikasi lima karakteristik penting untuk deliberasi yang sah.

b. Demokrasi Epistemik

Teori ini berfokus pada gagasan bahwa keputusan politik yang baik dapat dicapai melalui pengumpulan dan pertimbangan pengetahuan kolektif. Tokoh seperti John Dewey berpendapat bahwa demokrasi adalah proses eksperimen dan pencarian bersama, di mana warga negara dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah kolektif melalui diskusi terbuka dan inklusif.

c. Demokrasi Emergen

Pendekatan ini melihat demokrasi sebagai hasil dari interaksi spontan individu dalam jaringan yang terdesentralisasi, sering kali dimediasi oleh teknologi digital. Clay Shirky menggambarkan fenomena ini sebagai "kekuatan mengorganisir tanpa organisasi", di mana warga negara dapat berkolaborasi dan berinovasi untuk mengatasi masalah sosial tanpa struktur hirarkis formal.

d. Demokrasi Prefigurative

Teori ini menekankan pentingnya menciptakan struktur dan praktik politik yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat. Gerakan-gerakan sosial sering kali menerapkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dalam organisasi mereka sebagai bentuk eksperimen sosial, dengan harapan bahwa cara mereka berorganisasi akan mencerminkan masyarakat yang lebih adil dan egaliter.

e. Demokrasi Lisan

Konsep ini menyoroti pentingnya dialog langsung dan partisipasi verbal dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya dapat ditemukan dalam sistem Gram Sabha di India, di mana warga desa berkumpul untuk berdiskusi dan memutuskan masalah lokal secara langsung melalui pertemuan lisan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan local.

Jenkins berpendapat bahwa semakin "Web telah menjadi situs partisipasi konsumen". Masalah konsep seperti "budaya partisipatif" adalah bahwa partisipasi adalah istilah ilmu politik yang sangat terkait dengan teori demokrasi partisipatif.

Jenkins mendefinisikan partisipatif sebagai budaya dengan:

1. Hambatan yang relatif rendah untuk ekspresi artistik dan keterlibatan sipil
2. Dukungan kuat untuk menciptakan dan berbagi kreasi dengan orang lain,
3. Beberapa jenis bimbingan informal di mana apa yang diketahui oleh yang paling berpengalaman diteruskan ke pemula,
4. Anggota yang percaya bahwa kontribusi mereka penting, dan
5. Anggota yang merasakan beberapa tingkat hubungan sosial satu sama lain (setidaknya, mereka peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang apa yang telah mereka ciptakan) (Oratmangun & Rusadi, 2023).

### C. Teori Organisasi Mahasiswa

Organisasi terdiri dari kelompok orang-orang, atau dapat dikatakan juga terdiri dari kelompok-kelompok tenaga kerja (dalam hal organisasi perusahaan) yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dikembangkan dan dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Pengembangan dan pertahanan pola-pola perilaku tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, akan tetap berlangsung, meskipun orang-orangnya berganti. Dengan kata lain organisasi tetap ada, meskipun orang-orang atau anggota-anggota organisasi berubah-ubah.

Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang melakukan suatu bentuk kerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi juga sebagai wadah atau tempat kerja sama, dimana motor penggerakannya adalah manusia. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks membawa konsekuensi pada organisasi untuk bekerja keras mengerahkan segala strategi, metode, teknik dan segala upaya lain agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memuaskan.

Menurut Robbins mengatakan, bahwa: "Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Kurnia, 2014). Selanjutnya Hasibuan memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Kurnia, 2014).

Organisasi mahasiswa ekstra kampus merupakan suatu organisasi yang berlatar belakang kemahasiswaan yang berdiri di luar wewenang kampus. Istilah organisasi mahasiswa ekstra kampus ini muncul pada zaman orde baru yang menerapkan sistem NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) di dalam seluruh kampus di Indonesia, sehingga mengakibatkan lembaga mahasiswa seperti BEM dan yang lainnya ditiadakan karena dianggap berbahaya oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian muncul istilah organisasi ekstra kampus sebagai wujud eksistensi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang menyuarakan keadilan bagi rakyat Indonesia yang tertindas pada zaman orde baru.

Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan adalah sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri (soft skills). Kemampuan diri (soft skills) penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat berbaur dan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kemampuan diri (soft skills) dikenal dengan istilah kemampuan kewarganegaraan (civic skills). Keterampilan kewarganegaraan dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intellectual skills (keterampilan intelektual) dan participation skills (keterampilan partisipasi (Kosasih, 2017).

### D. Peran Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) FKIP

Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) FKIP Universitas Riau terdiri dari BEM, DPM, HIMA, Al-Maidan dan Mapala suluh yang dimana dari setiap organisasi tersebut memiliki tupoksi yang berbeda-beda dan juga memiliki visi organisasi yang sesuai dengan kepengurusan Organisasi dari setiap kelembagaan. BEM, DPM dan HIMA di FKIP Universitas Riau memiliki peran yang krusial dalam peningkatan Demokrasi Partisipasi di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Riau, kelembagaan tersebut sebagai penggerak awal dan dasar bagi seluruh mahasiswa/i di kalangan kampus terutama mahasiswa FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu pengetahuan).

BEM FKIP Universitas Riau di pimpinan oleh Gubernur mahasiswa (M. Paisal) merupakan Badan Eksekutif mahasiswa yang mewadahi dan membantu 16 Himpunan mahasiswa (HIMA) dalam perancangan dan pelaksanaan Program kerja selama 1 periode pengurusan. ORMAWA FKIP Universitas Riau sering kali mengadakan berbagai program kerja seperti forum diskusi, pertemuan dan kolaborasi yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, seperti program kerja tahunan berupa *Training Organization* yang bertujuan untuk membentuk kader-kader yang berkualitas dan berdampak kepada sesama. Sejatinnya kolaborasi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan organisasi bisa menciptakan budaya demokrasi dimana setiap mahasiswa memiliki hak dan kewajiban dalam memutuskan sebuah permasalahan atau perbincangan, namun kenyataannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan peran organisasi mahasiswa FKIP Universitas Riau tidak secara mudah dan merata dalam penguatan demokrasi

partisipatif dikalangan mahasiswa FKIP Universitas Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa ORMAWA FKIP memiliki beberapa jenis bentuk peran dalam membangun demokrasi partisipatif.

1. Pendidikan dan kepekaan politik terhadap kewarganegaraan

Organisasi mahasiswa berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik informal yang efektif. Melalui seminar, diskusi dan pelatihan, mereka membantu mahasiswa memahami sistem politik, struktur nasional, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Di dalam peran ini ORMAWA FKIP memiliki program kerja yang hampir sama, namun dengan nama yang berbeda seperti seminar kebangsaan, arahan kebangsaan dan lain sebagainya.

2. Pengawasan dan Advokasi Politik

Organisasi mahasiswa sering menjabat sebagai pengawas dan pedoman mengadvokasi baik di tingkat kampus maupun nasional. Mereka memantau pedoman yang diterapkan, memberikan kritik konstruktif, dan memberikan suara pada upaya mahasiswa di berbagai forum. Peran ini penting untuk memastikan bahwa pedoman yang difilmkan mencerminkan minat dan kebutuhan mahasiswa. Nama program kerja tersebut adalah PAL (Pelatihan Advokasi Lanjutan), sekolah advokasi dan audiensi.

3. Memperkuat demokrasi dan nilai partisipasi sosial

Organisasi mahasiswa mengkomunikasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan mempromosikan partisipasi sosial melalui kegiatan seperti seminar nasional, konvensi artikel ilmiah dan organisasi nirlaba. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman demokrasi, tetapi juga membentuk kepribadian mahasiswa dalam berkehidupan yang saling bertoleransi dan bekerja sama. Program kerja di antaranya bedah buku, diskusi perkusi dan diskusi publik.

Analisis faktor keberhasilan demokrasi partisipatif:

1. Analisis Individu

Kampus merupakan laboratorium pengembangan diri yang mempelajari berbagai hal, seperti upaya pengembangan diri dengan mengikuti organisasi. Organisasi yang baik adalah ORMAWA yang mampu memberikan pengajaran dan pengalaman yang berdampak kepada mahasiswa yang berpartisipasi didalamnya. Hal tersebut bisa dipelajari dengan mengimplementasikan demokrasi partisipatif. Terciptanya suatu demokrasi partisipatif tentunya terdapat banyak elemen di dalamnya, salah satunya adalah mahasiswa yang berani bersuara dan mampu berpikir kritis terhadap isu-isu krusial yang sedang hangat di perbincangkan. Tapi pada saat sekarang ini banyak mahasiswa yang apatis dan malah memposisikan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab melemahnya demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Riau. Dengan adanya BEM, DPM dan HIMA diharapkan mampu untuk membawa sebuah pembaruan terhadap melemahnya rasa kekeluargaan dan patriotisme mahasiswa.

ORMAWA tersebut juga diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan nalar kritis, intelektual dan rasa kemanusiaan. Adanya ORMAWA juga cukup krusial seperti yang penulis sebutkan diatas, masih banyak mahasiswa yang apatis bahkan pergerakan mahasiswa FKIP sekarang ini mengalami pengurangan partisipan, hal ini Sangat disayangkan karena terjadi degradasi nilai marwah suatu organisasi gerakan yang Mengarah ke arah politik praktis. Pada saat ini BEM, DPM terutama HIMA dalam melaksanakan program kerjanya hanya seakan meneruskan program kerja turunan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan zaman tetapi tidak semua program kerja yang dilaksanakan sebagai program kerja turunan ada juga beberapa program kerja terbaru yang mengikuti arah perkembangan zaman di beberapa ORMAWA FKIP Universitas Riau.

2. Kelompok Diskusi

BEM, DPM dan HIMA memiliki tupoksi dan fungsi tersendiri dan berbeda dalam menjalankan amanahnya, namun 3 ORMAWA tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu di antaranya meningkatkan

penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa. Dalam realisasinya BEM FKIP Universitas Riau melaksanakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan mahasiswa FKIP di antaranya kajian isu, kelas edukasi dan kegiatan lainya sebagai upaya dalam peningkatan demokrasi di kalangan mahasiswa. Hal tersebut juga dilakukan oleh DPM dan 16 HIMA yang ada di FKIP Universitas Riau namun nyatanya kegiatan-kegiatan seremonial tentunya menjadi penghalang untuk meningkatkan daya tarik mahasiswa dalam mengikutinya, melalui observasi dan diskusi penulis menemukan beberapa faktor melemahnya demokrasi di kalangan mahasiswa di antaranya kegiatan yang tidak berdampak kepada seluruh mahasiswa. Dengan perkembangan zaman pada saat ini banyak anak muda yang lebih memilih beraktivitas dengan menggunakan media sosial dan dunia maya, tidak jarang mahasiswa lebih memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan di media sosial seperti menjadi konten kreator dan berjualan Online. Hal tersebut lah yang menjadi salah satu faktor besar melemahnya partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan. Diskusi lainya mengatakan bahwasanya pada saat sekarang ini mahasiswa yang berkuliah hanya ingin cepat menyelesaikan studinya supaya bisa cepat mendapatkan pekerjaan.

BEM, DPM dan HIMA memiliki tupoksi dan fungsi tersendiri dan berbeda dalam menjalankan amanahnya, namun 3 ORMAWA tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu di antaranya meningkatkan penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa. Dalam realisasinya BEM FKIP Universitas Riau melaksanakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan mahasiswa FKIP di antaranya kajian isu, kelas edukasi dan kegiatan lainya sebagai upaya dalam peningkatan demokrasi di kalangan mahasiswa. Hal tersebut juga dilakukan oleh DPM dan 16 HIMA yang ada di FKIP Universitas Riau namun nyatanya kegiatan-kegiatan seremonial tentunya menjadi penghalang untuk meningkatkan daya tarik mahasiswa dalam mengikutinya, melalui observasi dan diskusi penulis menemukan beberapa faktor melemahnya demokrasi di kalangan mahasiswa di antaranya kegiatan yang tidak berdampak kepada seluruh mahasiswa. Dengan perkembangan zaman pada saat ini banyak anak muda yang lebih memilih beraktivitas dengan menggunakan media sosial dan dunia maya, tidak jarang mahasiswa lebih memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan di media sosial seperti menjadi konten kreator dan berjualan Online. Hal tersebut lah yang menjadi salah satu faktor besar melemahnya partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan. Diskusi lainya mengatakan bahwasanya pada saat sekarang ini mahasiswa yang berkuliah hanya ingin cepat menyelesaikan studinya supaya bisa cepat mendapatkan pekerjaan.

Implementasi peran organisasi kemahasiswaan FKIP Universitas Riau dalam penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa sangat memberikan dampak kepada keberlanjutan ORMAWA dan berbagai Program kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada 53 mahasiswa diantaranya merupakan ketua HIMA selingkuhan FKIP menghasilkan beberapa fakta dan kondisi tentang eksistensi demokrasi partisipatif dikalangan kelembagaan. 10 dari 16 ketua HIMA ( Bupati) mengatakan terdapat banyak kendala dalam meningkatkan demokrasi partisipatif hal tersebut bisa dilihat dari jumlah kepengurusan yang tidak meningkat secara spesifik dan bahkan menurun, jumlah partisipan yang semakin berkurang dalam mengikuti program kerja dan jumlah pemilih dalam pemira yang menurun pada 2 tahun terakhir, pada pemira tahun 2024 jumlah partisipan sebanyak 1.818 partisipan, jumlah tersebut sangat berkurang dibandingkan dengan jumlah partisipan pemira FKIP tahun 2023 dengan jumlah partisipan 1.889 mahasiswa. Kurang efektif penguatan demokrasi partisipatif disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya;

1. Kurang dilibatnya mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan
2. Kegiatan kemahasiswaan yang kurang menguntungkan dan ketinggalan zaman
3. Manajemen waktu mahasiswa yang masih kurang
4. Kesibukan diluar perkuliahan

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penghambat dalam penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa/I FKIP Universitas Riau. Dengan demikian, peran ORMAWA yang optimal diperlukan untuk Memastikan bahwa demokrasi di kampus tidak hanya menjadi formalitas tetapi juga benar-benar Mewakili dan melibatkan seluruh mahasiswa, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan Akademik yang lebih adil, terbuka, dan demokratis. Secara keseluruhan peran ORMAWA FKIP Universitas Riau seperti BEM, DPM dan HIMA cukup signifikan dalam peningkatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Riau, mereka berfungsi sebagai katalisator untuk Partisipasi aktif mahasiswa dalam proses demokrasi dan berperan aktif untuk memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Namun

ORMAWA tersebut perlu pengoptimalisasian peran untuk memastikan bahwa demokrasi kampus benar-benar inklusif dan mewakili seluruh Mahasiswa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan FKIP Universitas Riau, seperti BEM, DPM, dan HIMA, memiliki peran yang signifikan dalam penguatan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik mahasiswa, memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Organisasi mahasiswa tidak hanya menjadi wadah pengembangan soft skills, tetapi juga sarana pendidikan politik informal yang memperkuat civic engagement. Namun demikian, pelaksanaan demokrasi partisipatif di kalangan mahasiswa FKIP masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan organisasi, apatisisme mahasiswa, kurangnya inovasi program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan minat generasi muda, serta dominasi kegiatan seremonial yang cenderung formalistik. Penurunan partisipasi dalam pemilihan raya mahasiswa dan minimnya antusiasme terhadap kegiatan advokasi menunjukkan adanya degradasi semangat demokrasi di kalangan mahasiswa. Selain itu, perkembangan teknologi dan budaya digital turut mengalihkan perhatian mahasiswa dari ruang-ruang diskusi dan aksi nyata di kampus ke dunia maya yang lebih individualistik. Oleh karena itu, agar demokrasi partisipatif di lingkungan kampus dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, diperlukan reorientasi strategi organisasi mahasiswa untuk lebih adaptif terhadap dinamika zaman, mengembangkan program-program yang relevan dan berdampak luas, serta memperkuat nilai-nilai kolektivitas, kepemimpinan yang visioner, dan budaya partisipatif yang sejati. Hanya dengan cara tersebut ORMAWA dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim demokrasi kampus yang sehat, kritis, dan progresif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, N., Sagala, I., Armansyah, Y., & Dastina, W. (2023). Focus Group Discussion Penguatan Majelis Taklim Perempuan Untuk Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(4), 520–527. <https://doi.org/10.24036/abdi.v5i4.747>
- Failaq, M. R. F., & Madjid, M. A. S. W. (2022). Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2802>
- Indriani, C. (2020). *Skripsi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa pali kecamatan bittuang kabupaten tana toraja*.
- Kosasih, K. (2017). Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 188. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6196>
- Kurnia, H. (2014). Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. *Academy of Education Journal*, 5(2), 91–103. <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i2.120>
- Oratmangun, D., & Rusadi, U. (2023). Media Sosial sebagai Demokrasi Partisipatif yang Potensial. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(2), 491–495. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i3.2515>
- Rohmatin, Z., Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., & Rizqullah, R. (2024). *Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital*. 4.
- Sholikin, A. (2021). 2693-Article Text-4457-1-10-20211203. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 168–184.
- Wiralestari, Arum, E. D. P., Wijaya, R., & Friyani, R. (2024). Abdimas galuh. *Abdimas Galuh*, 6(1), 1–8